BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2007 sampai 2011 yang bersumber pada APBD yang meliputi rasio kemandirian, rasio efektifitas dan efisiensi, rasio keserasian, *debt service coverage ratio* serta rasio pertumbuhan dapat dijadikan tolak ukur atas keberhasilan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Perhitungan rasio efektifitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar menunjukkan adanya penurunan selama periode penelitian tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, hal ini menunjukkan Pemerintah Daerah belum mampu merealisasikan PAD yang direncanakan dan pada tahun 2011 menunjukkan adanya peningkatan, hal ini menunjukkan peningkatan upaya Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD sesuai dengan target yang direncanakan. Rasio efisiensi PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2007 sampai dengan 2011 mengalami fluktuasi, kondisi tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar belum mampu melakukan efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dalam upaya memenuhi realisasi penerimaan PAD.

Hasil perhitungan rasio keserasian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar lebih memprioritaskan dananya untuk kebutuhan belanja rutin seperti belanja pegawai, barang dan jasa dari pada belanja

pembangunan. Besarnya belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap APBD sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan, sedangkan untuk rasio aktifitas menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan belum optimal karena mengalami penurunan alokasi dana pada sektor pembangunan atau sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar belum diprioritaskan untuk kebutuhan belanja pembangunan pada daerahnya.

Ditinjau dari rasio DSCR bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dapat menggunakan alternatif sumber dana lain, yaitu dengan melakukan pinjaman jika terjadi kekurangan dalam mencukupi kebutuhan belanjanya.

Hasil rasio pertumbuhan menunjukkan hasil kinerja yang baik karena Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Jadi secara keseluruhan Pemerintah Daerah Kabupaten blitar menunjukkan kinerja yang baik karena mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Sedangkan berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Firmansyah (2009) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja

keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Madura mulai tahun 2006 sampai dengan 2008 dapat diketahui kinerja keuangan yang masuk dalam kategori tidak baik, khususnya untuk rasio kemandirian, efektivitas, *debt service coverage Ratio (DSCR)* dan rasio pertumbuhan pendapatan.

Kesimpulan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kecenderungan mengalami penurunan apabila ditinjau dari rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, debt service coverage Ratio (DSCR) dan rasio pertumbuhan pendapatan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang kurang baik pada rasio-rasio tersebut. Sedangkan untuk rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi menunjukkan kinerja yang baik.

B. SARAN

Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar menggali kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah, menggali potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah, melakukan pengendalian secara tepat atas sumber-sumber pendapatan daerah, meminimalisir biaya-biaya dalam upaya memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kinerja seluruh elemen yang dimiliki oleh instansi untuk bekerja secara maksimal dalam usaha merealisasi anggaran pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan.